



# RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2025 - 2029**





## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk jangka menengah periode tahun 2025 – 2029.

Renstra ini berisikan tentang gambaran pelayanan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah, yang secara keseluruhan menggambarkan rencana program kerja jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 – 2029.

Akhirnya semoga Renstra ini bermanfaat dan menjadi acuan serta panduan dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 – 2029.

Bengkalis, Januari 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BENGKALIS**



**H. HAMBALI, S.Pd.I**

NIP. 19670305 198811 1 001



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	11
1.4. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS</b> .....	14
2.1. Tugas, Fungsi, Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah .....	14
2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah .....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah .....	28
2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah .....	30
2.6. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati .....	40
2.7. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	50
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> ..	64
3.1. Tujuan .....	64
3.2. Sasaran .....	67
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	67
3.4. Cascading .....	76
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> .....	83
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	83
4.2. Indikator Kinerja .....	102
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	104



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pejabat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Jabatan Eselon .....	17
Tabel 2.2 Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Pangkat .....	18
Tabel 2.3 Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	18
Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah .....	19
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	22
Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja DPPKB Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 – 2024 .....	26
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Renstra DPPKB Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 .....	65
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	68
Tabel 3.3 Cascading Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah .....	77
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 .....	90
Tabel 4.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan DPPKB Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 .....	91
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKB Kabupaten Bengkulu Tengah yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 .....	103
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPPKB Kabupaten Bengkulu Tengah yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 .....	103



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra .....	3
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan .....	6
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis .....	16
Gambar 2.2 Angka Kelahiran Kasar ( <i>Crude Birth Rate</i> ) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022 .....	32
Gambar 2.3 Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 .....	33
Gambar 2.4 Peserta Akseptor MKJP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 .....	34
Gambar 2.5 Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 .....	36
Gambar 2.6 Tren MUKP di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 .....	37
Gambar 2.7 Persentase Masyarakat Terpapar Program Bangga Kencana Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 .....	38

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pelaku perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Keberhasilan capaian dari Rencana Strategis

Perangkat Daerah ini diukur melalui indikator yang telah ditetapkan target tahunannya.

Selanjutnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah upaya dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk seimbang serta keluarga berkualitas. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis ini memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 disusun melalui beberapa tahapan, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD. Secara garis besar proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Alur Penyusunan Rencana Strategis**



Secara rinci tahapan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap persiapan adalah:

#### 1) Pembentukan Tim Penyusunan Renstra

Tim penyusun Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### 2) Orientasi

Orientasi Renstra DisdaldukKB dilakukan bersama Tim Penyusun Renstra DisdaldukKB. Kegiatan orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan teknis penyusunan dokumen Renstra DisdaldukKB Kabupaten Bengkulu Tengah.



### 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim

Rencana kerja Tim Penyusun Renstra DisdaldukKB disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahapan persiapan sampai nantinya ditetapkan.

### 4) Penyiapan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- Menyusun daftar data/informasi dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

## 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra DisdaldukKB dilakukan melalui pengolahan data dan informasi, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis gambaran pelayanan DisdaldukKB, analisis permasalahan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah, perumusan strategi dan arah kebijakan dan perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung kebijakan DisdaldukKB Kabupaten Bengkulu Tengah.

## 3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra DisdaldukKB yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Berita Acara Forum Perangkat Daerah. Penyempurnaan rancangan awal renstra perangkat daerah dilengkapi dengan perbaikan atau

masukannya yang telah dituangkan dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah rancangan awal Renstra.

#### **4. Tahap Penetapan**

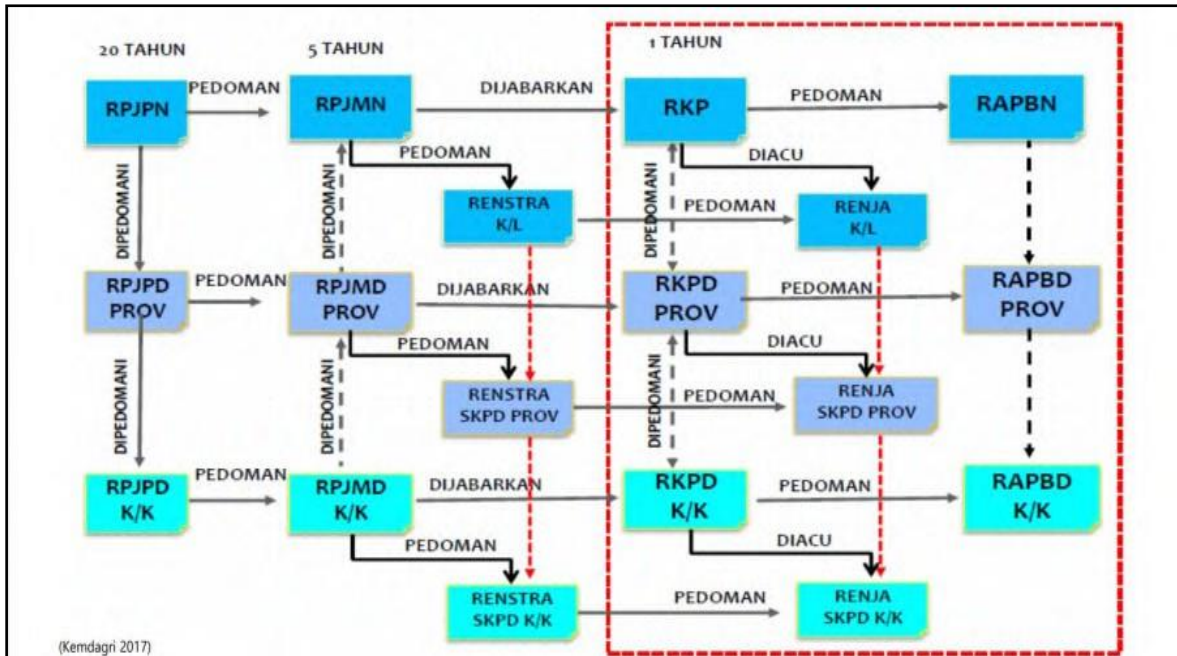
Setelah rancangan akhir selesai, dokumen Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bidang Mitra di Bappeda terkait untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan tenggang waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, begitupun dengan Renstra DisdaldukKB Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 mempunyai fungsi strategis sebagai berikut:

- 1) Sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DisdaldukKB Kabupaten Bengkulu selama 5 tahun ke depan;
- 2) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DisdaldukKB Kabupaten Bengkulu;
- 3) Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja DisdaldukKB dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
- 4) Kontrak kinerja Kepala DisdaldukKB Kabupaten Bengkulu dengan Kepala Daerah; dan
- 5) Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas dan fungsi DisdaldukKB Kabupaten Bengkulu.

Renstra DisdaldukKB Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun

keterkaitan antar dokumen perencanaan secara lebih lengkap dapat dilihat pada gambar 1.2.

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



Tahapan perencanaan dari tingkat nasional sampai daerah dimulai dengan penyusunan dokumen RPJPN/RPJPD provinsi/RPJPD kabupaten/kota untuk masa 20 tahun. Kemudian diturunkan menjadi dokumen lima tahunan daerah yaitu dokumen RPJMN/RPJMD provinsi/RPJMD kabupaten/kota. Dokumen ini, diturunkan menjadi dokumen lima tahunan organisasi perangkat daerah yang disebut Renstra. Renstra juga terdiri dari Renstra K/L, Renstra perangkat daerah provinsi dan Renstra perangkat daerah kabupaten/kota. Dari dokumen perencanaan lima tahunan, dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen RKP/RKPD provinsi/RKPD kabupaten/kota untuk tingkat daerah.

Sementara itu juga disusun dokumen tahunan perangkat daerah yang disebut Renja K/L, Renja perangkat daerah provinsi/Renja perangkat daerah kabupaten/kota.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bengkalis dan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Begitu juga dalam perumusan strategi dan arah kebijakan serta program DisdaldukKB juga mempunyai relevansi dan konsistensi dengan RPJMD dan selanjutnya RPJMD ini dijabarkan ke dalam RKPD tahunan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2025 - 2029;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029;
3. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan Nasional;
6. Regulasi yang berlaku.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 berdasar pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1266);
18. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 870);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2025-2029;
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang telah disepakati pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 ke dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 – 2029.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah, serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Dasar penyusunan kebijakan dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Menjadi acuan resmi untuk pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 – 2029 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah**

Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, aset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; informasi tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah; identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan untuk masa lima tahun mendatang.

##### **BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah dalam lima tahun mendatang.



#### **BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Memuat program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu anggaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 – 2029. Pada bagian ini juga dikemukakan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB V Penutup**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis**

##### **2.1.1. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

##### **2.1.2. Fungsi**

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1). perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 2). pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;



- 3). pelaksanaan koordinasi penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 4). peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 5). pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- 6). pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- 7). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

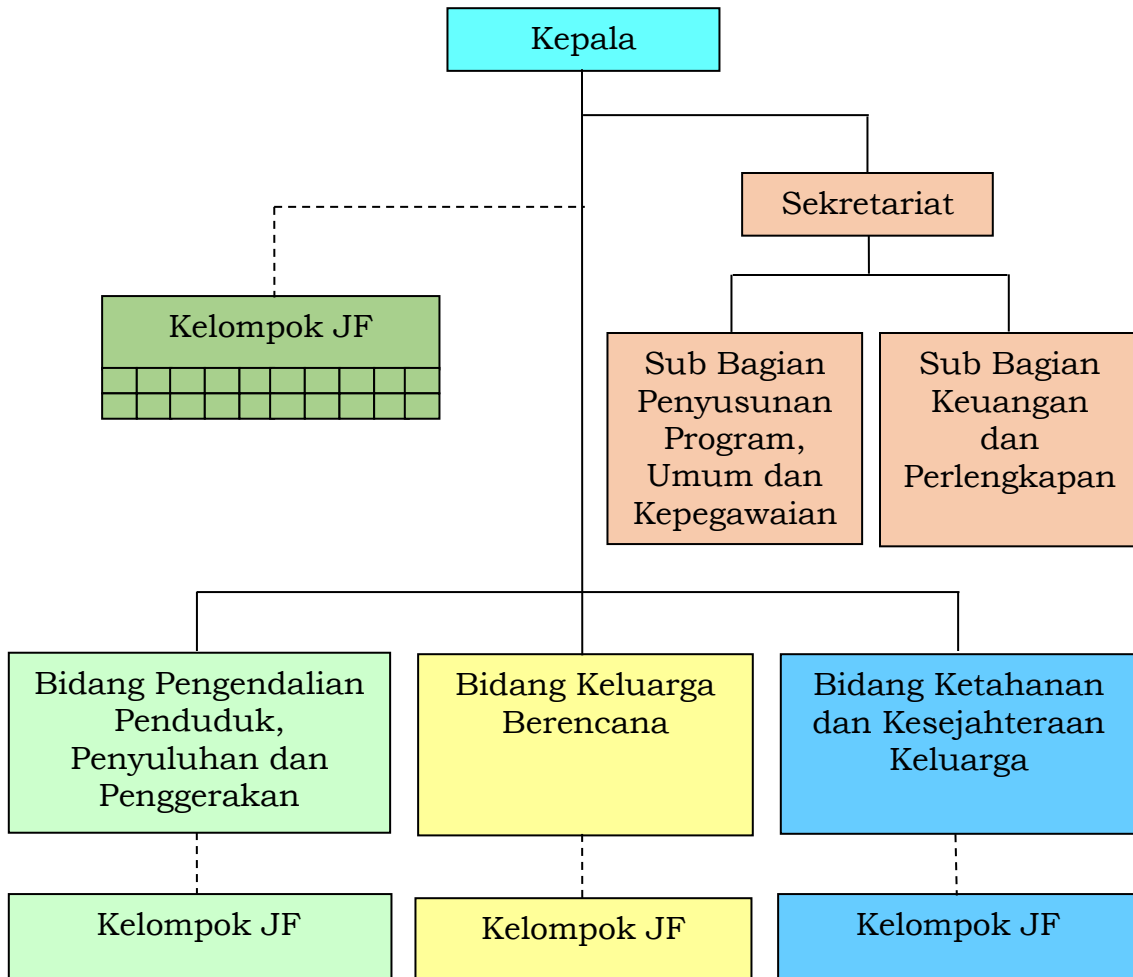
### **2.1.3. Kedudukan**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

### **2.1.4. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis maka Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah**



Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari:

- 1). Kepala Dinas
- 2). Sekretariat, terdiri dari:
  - Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan
  - Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- 3). Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

- 4). Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5). Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki sumber daya manusia berjumlah 40 orang PNS dengan rincian jumlah PNS menurut jabatan, golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pejabat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Jabatan Eselon**

<b>No</b>	<b>Jenis Jabatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Eselon II a	1	-	1
2	Eselon III a	-	1	1
3	Eselon III b	1	2	3
4	Eselon IV a	1	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

Jumlah PNS perempuan lebih banyak berdasarkan jenis jabatan dengan jumlah perempuan ada 4 orang dan laki-laki 3 orang. Dari total pegawai negeri sipil 40 orang dan PNS perempuan ada 20 orang dan PNS laki-laki juga 20 orang. Selengkapnya disajikan pada tabel 2.2 dibawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Pangkat**

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV b	2	1	3
2	Golongan IV a	3	1	4
3	Golongan III d	2	4	6
4	Golongan III c	-	7	7
5	Golongan III b	4	5	9
6	Golongan III a	5	2	7
7	Golongan II d	4	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>

**Tabel 2.3**  
**Jumlah PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S 2	5	2	7
2	S 1	6	13	19
3	D 3	1	1	2
4	SLTA	8	4	12
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>

Jumlah PNS sebagian besar lulusan S1 sejumlah 19 orang, berpendidikan D3 ada 2 Orang, SLTA ada 12 orang dan S2 ada 7 orang dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan potensi bagi organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya di Kabupaten Bengkulu.



### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Bengkulu Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah**

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
1	Tanah dan Bangunan Kantor	4.025 m2 & 600 m2	Baik
2	Mobil pejabat	7	Baik
3	Mobil antar jemput akseptor	1	Baik
4	Mobil pelayanan KB	1	Baik
5	Mobil distribusi Alokon	1	Baik
6	Sepeda Motor	14	Baik
7	Gerobak dorong	1	Baik
8	Rak penyimpanan	2	Baik
9	Mesin ketik manual	2	Baik
10	Mesin hitung manual	1	Baik
11	Mesin foto copy	3	Baik
12	Lemari besi	4	Baik
13	Rak besi	2	Baik
14	Filling besi	2	Baik
15	Brankas	1	Baik
16	Lemari kaca	3	Baik
17	Lemari kayu	1	Baik
18	Alat penghancur	5	Baik
19	White board	2	Baik
20	Infocus	1	Baik
21	Mesin pompa air	1	Baik



<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keadaan</b>
22	Meja rapat	1	Baik
23	Meja tulis	6	Baik
24	Meja reseption	1	Baik
25	Kursi tamu	1	Baik
26	Kursi tangan	2	Baik
27	Kursi putar	6	Baik
28	Kursi lipat	1	Baik
29	Meja computer	2	Baik
30	Sofa	3	Baik
31	Alat pengukur waktu	1	Baik
32	Lemari es	1	Baik
33	AC Split	9	Baik
34	Kipas angin	1	Baik
35	Kompor gas	1	Baik
36	Kitchen set	1	Baik
37	Tabung gas	2	Baik
38	Televisi	4	Baik
39	Loud speaker	1	Baik
40	Sound system	4	Baik
41	Meja jahit	1	Baik
42	Dispenser	1	Baik
43	Handy cam	1	Baik
44	Alat rumah tangga	4	Baik
45	Komputer PC	17	Baik
46	Laptop	7	Baik
47	Notebook	12	Baik
48	Peralatan computer	1	Baik
49	Printer	14	Baik



No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
50	Meja pejabat Eselon II	1	Baik
51	Meja pejabat Eselon III	3	Baik
52	Meja pejabat Eselon IV	11	Baik
53	Kursi meja pejabat Eselon II	1	Baik
54	Kursi meja pejabat Eselon III	3	Baik
55	Kursi meja pejabat Eselon IV	11	Baik
56	Lemari arsip	2	Baik
57	Lemari lainnya	1	Baik
58	Camera + attachment	2	Baik
59	Proyektor attachment	2	Baik
60	Uninterruptible Power Supply	23	Baik
61	Kamera elektronik	1	Baik
62	Lensa camera	1	Baik
63	Intermediate telephony	1	Baik
64	Mesin board	0	Baik
65	Mesin jahit overlock	1	Baik
66	Alat pemadam kebakaran	1	Baik
67	CCTV	1	Baik

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, indikator yang menjadi kewenangan urusan



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 31 Indikator, sebagaimana terlihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	INDIKATOR	RUMUS
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$r = \left\{ \left( \frac{P_t}{P_0} \right) \times \left( \frac{1}{t} \right) - 1 \right\} \times 100$ <p>r = laju pertumbuhan penduduk            P<sub>t</sub> = Jumlah penduduk pada tahun t P<sub>0</sub> = Jumlah penduduk pada tahun dasar            t = selisih tahun P<sub>t</sub> dengan P<sub>0</sub> P<sub>t</sub> =</p> $P_0 + (B - D) + (M_i - M_o)$ <p>P<sub>t</sub> = Jumlah penduduk pada tahun ke t            P<sub>0</sub> = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0)            B (<i>birth</i>) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (<i>death</i>) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t M<sub>o</sub> = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t M<sub>i</sub> = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t</p>
2.	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{P_{if}} \times K$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total            ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</p> <p>b<sub>i</sub> = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu            p<sub>i</sub> = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama            i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ....., i=7 untuk kelompok umur 45-49            K = bilangan kontanta biasanya 1000</p>
3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100$
4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100\%$
5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk



NO	INDIKATOR	RUMUS
6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah Sektor
7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan
8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}}$
9.	Ratio Akseptor KB	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
10.	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	$\frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama}} \times 1000$
12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}}$
13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{Jumlah Akseptor KB}} \times 100\%$
15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi}}{\text{Jumlah Akseptor KB}} \times 100\%$
16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKB}} \times 100\%$



NO	INDIKATOR	RUMUS
17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKR}} \times 100\%$
18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKL}} \times 100\%$
19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$
20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	$\frac{\text{Jumlah PIK R/M}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$
21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	$\frac{\text{Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan}}{\text{Jumlah PKB/PLKB}} \times 100\%$
22.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri}}{\text{Jumlah anggota kelompok UPPKS}} \times 100\%$
23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$
24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota}}{\text{Perkiraan Permintaan Masyarakat}} \times 100\%$
25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS}}{\text{Jumlah Faskes dan jejaring}} \times 100\%$



NO	INDIKATOR	RUMUS
26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	$\frac{\text{Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga}} \times 100\%$
27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	$\frac{\text{Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)}}{\text{Jumlah remaja}} \times 100\%$
28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	$\frac{\text{Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga}}{\text{Jumlah kelompok kegiatan}} \times 100\%$
29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang}}{\text{Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak}} \times 100\%$
30.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	$\frac{\text{Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)}}{\text{Jumlah wanita menurut usia kawin pertama}}$
31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	$\frac{\text{Jumlah anggaran untuk urusan PPKB}}{\text{Jumlah APBD dan APBDes}} \times 100\%$

### 2.3.1. Pencapaian Kinerja DPPKB Kabupaten Bengkulu

Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu dari tahun 2021 sampai dengan 2024 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 2.6 berikut :



**Tabel 2.6**  
**Capaian Indikator Kinerja DPPKB Kabupaten Bengkulu**  
**Tahun 2021 – 2024**

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,99	1,65	1,65	1,29
2	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,64	2,62	2,45	2,5
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	25	50	50	50
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	3	4	4
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	8	8	8	8
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1	22	4	4
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2-3	2-3	2-3	2-3
9	Ratio Akseptor KB	47,4	42,9	64,1	72,6
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun	62,4	62,6	64,1	78,5
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	25,3	17,5	14,7	14,9



No	Indikator	2021	2022	2023	2024
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1,72	1,68	1,74	0,54
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	30,9	15,5	12,7	2,7
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,2	17,7	17,85	21,3
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	66,5	70,1	74,3	78,4
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	94,2	96,3	99,9	100,0
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	48,7	51,3	79,1	86,5
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	30,2	36,7	54,05	76,27
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	1	1	2	10
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	40,65	40,9	41,27	41,27
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri	69,4	72,5	75,8	79,9
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100



No	Indikator	2021	2022	2023	2024
26	Jumlah Keluarga	141.210	145.478	150.960	154.288
27	Jumlah PUS	82.094	84.908	96.553	97.560
28	Jumlah Keluarga Anggota BKB	N.A.	833	3.312	8.766
29	Jumlah Keluarga Anggota BKR	N.A.	890	2.858	5.821
30	Jumlah Keluarga Anggota BKL	N.A.	927	3.346	4.703
31	Jumlah Remaja (sasaran PIK-R)	88.922	89.274	92.165	94.238

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan di masa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelayanan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang mengemukakan berbagai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu, sebagai berikut:



**a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis:**

1. Menurunkan angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) di Kabupaten Bengkalis yang tertinggi di Provinsi Riau yakni sebesar 20,71 pada tahun 2022.
2. Menurunkan angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) pada Wanita Usia Subur 15-49 tahun di Kabupaten Bengkalis yang paling tinggi dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau yakni sebesar 2,5 pada tahun 2024.
3. Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) di Kabupaten Bengkalis yang masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau, yakni sebesar 65,25 pada tahun 2024.
4. Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan di Kabupaten Bengkalis yang pada tahun 2024 masih lebih rendah dari target yang ditetapkan yakni sebesar 22,10 tahun dibanding target sebesar 22,74 tahun. MUKP di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 22,10 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 23,00 tahun.
5. Meningkatkan persentase Peserta Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (PA MKJP) di Kabupaten Bengkalis yang masih lebih rendah dibanding beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan persentase sebesar 21,3% pada tahun 2024.

**b. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis:**

1. Adanya komitmen dari pemerintah pusat dalam mensukseskan program Bangga Kencana di daerah dengan menyusun kebijakan, dukungan teknis dan anggaran untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasana pelayanan KB.



2. Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang dibuktikan dengan program-program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Bengkulu Tengah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Adanya dukungan dari Perangkat Daerah lain dan lintas sektor terkait dalam mensukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
4. Ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sampai ke tingkat Kecamatan dan Desa.

## **2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah**

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional, serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengemban tugas dan fungsinya harus memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Masalah dan isu-isu strategis yang terkait dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan acuan dasar untuk menentukan prioritas dan strategi yang harus dilakukan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau



dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

### **2.5.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Perencanaan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Lima tahun Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sebelumnya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup signifikan namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi sepenuhnya, peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan-permasalahan secara rinci yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

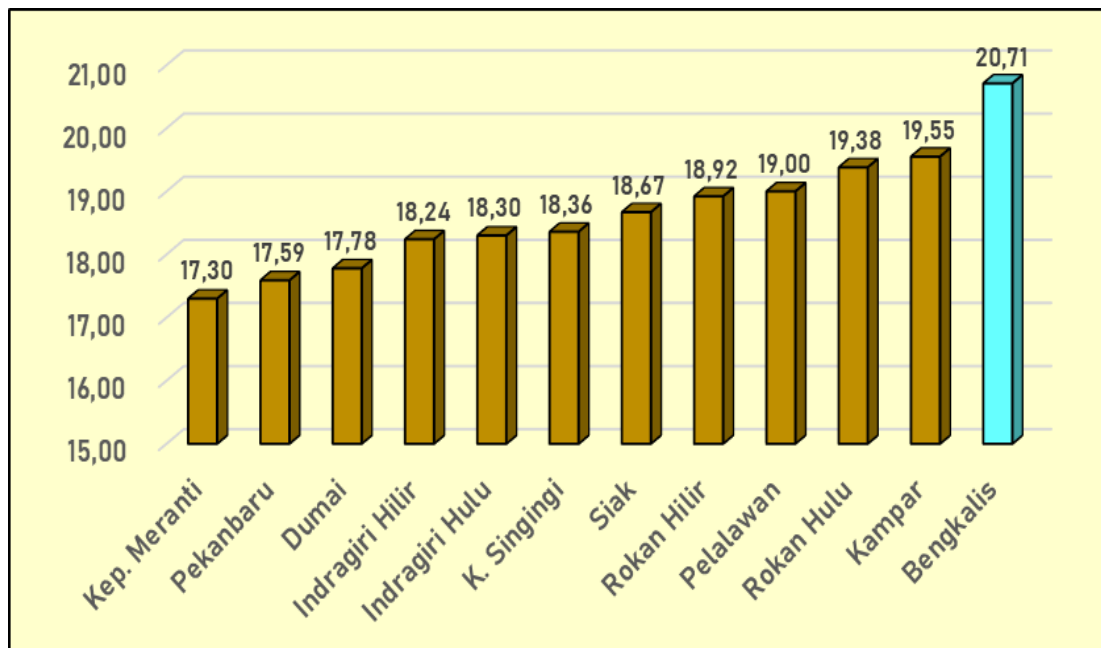
a. Permasalahan terkait Kesekretariatan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait Bidang Keluarga Berencana

1. Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) di Kabupaten Bengkalis adalah yang tertinggi di Provinsi Riau yakni sebesar 20,71 pada tahun 2022. Angka kelahiran kasar Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 2.2.

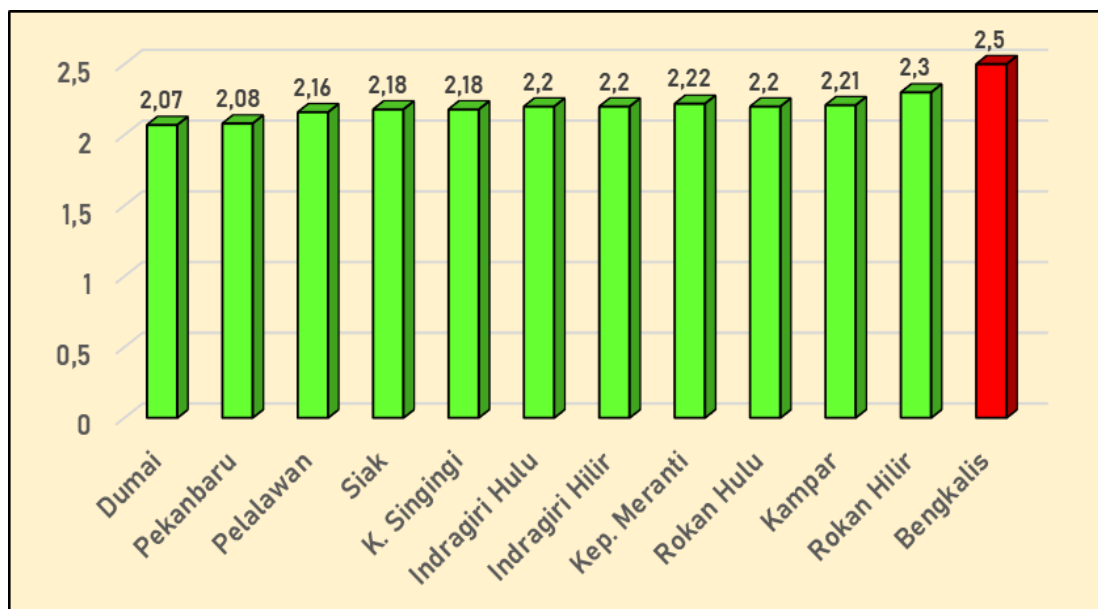
**Gambar 2.2**  
**Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022**



Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1.000 penduduk dalam satu tahun. Ini adalah indikator demografi dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesuburan suatu populasi. CBR memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan suatu populasi, yang dapat memberikan informasi tentang pertumbuhan penduduk.

2. Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 2,5 merupakan TFR yang tertinggi se-Provinsi Riau. Perbandingan TFR Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.3.

**Gambar 2.3**  
**Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024**



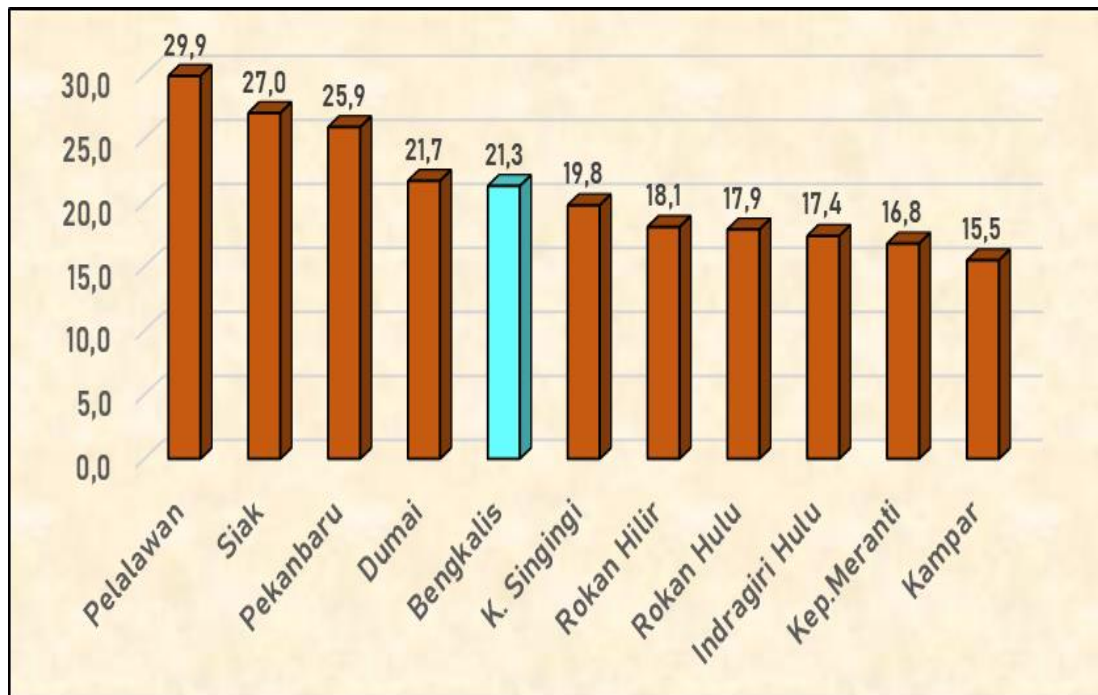
Angka kelahiran total adalah indikator demografi yang mengukur rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa suburnya (usia 15-49 tahun) jika ia mengikuti pola kelahiran yang berlaku saat ini. TFR digunakan untuk membandingkan tingkat kesuburan antar wilayah, mengukur



keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), serta membantu perencanaan pembangunan terkait kependudukan. TFR sebesar 2,1 sering dianggap sebagai angka kesuburan yang ideal untuk menjaga stabilitas populasi (penduduk tumbuh seimbang). TFR di bawah 2,1 menunjukkan potensi penurunan populasi, sedangkan TFR di atas 2,1 menunjukkan potensi pertumbuhan populasi. TFR di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 ini meningkat dibanding TFR tahun 2023 sebesar 2,45.

3. Peserta Akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (PA MKJP) di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 21,3 masih lebih rendah dibanding beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Peserta Akseptor Keluarga Berencana dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (PA MKJP) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.4.

**Gambar 2.4**  
**Peserta Akseptor MKJP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau**  
**Tahun 2024**





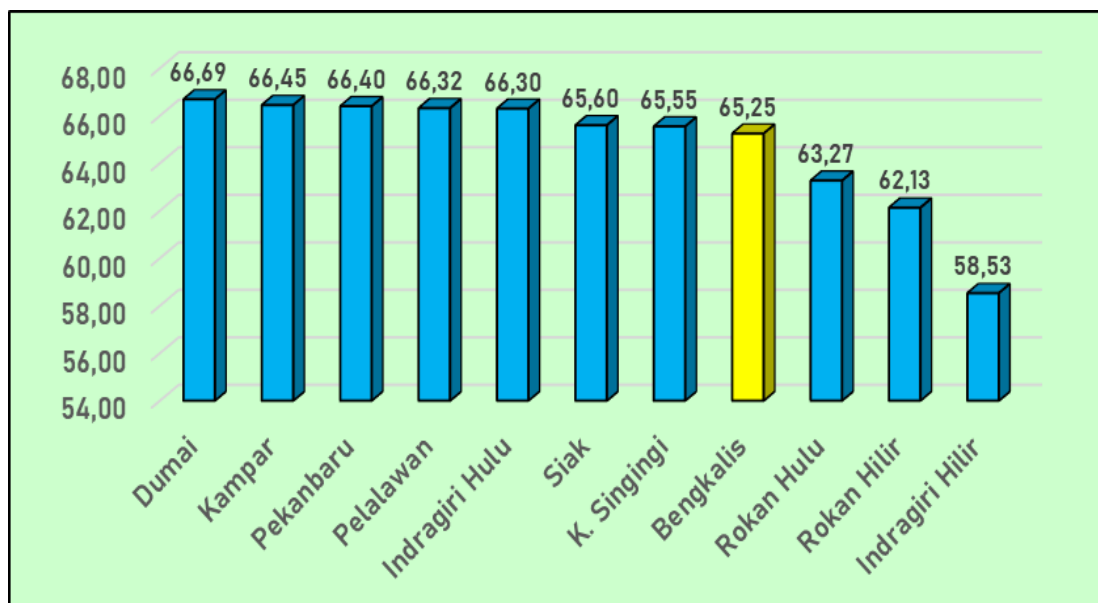
PA MKJP ini merujuk pada pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi jangka panjang untuk mencegah kehamilan. PA MKJP adalah bagian dari program Keluarga Berencana (KB) yang berfokus pada penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dengan tujuan untuk menurunkan angka *stunting* dan meningkatkan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran yang lebih baik.

4. *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (MCPR) atau penggunaan rata-rata kontrasepsi modern di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2024 sebanyak 78,3% masih didominasi oleh penggunaan alat kontrasepsi metode jangka pendek (pil, suntik, kondom). Akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek ini sebesar 61,6% dan metode kontrasepsi jangka pendek ini sangat rawan untuk *drop out* atau pemakaian kontrasepsi putus pakai yang bisa mengakibatkan kehamilan.
5. Jumlah sumber daya manusia pelaksana program Bangga Kencana di lapangan yang masih terbatas. Pada saat ini di Kabupaten Bengkalis terdapat 19 tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), 3 orang tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan 35 orang tenaga Pendamping Penyuluh Keluarga Berencana (PPKB) yang tersebar di 11 Kecamatan. Tenaga lapangan penggerak Program Bangga Kencana di Kabupaten Bengkalis sebanyak 57 orang ini bertanggung jawab di 155 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkalis, sehingga 1 orang bertanggungjawab di 2 s/d 3 desa/kelurahan. Terbatasnya sumber daya manusia dan luasnya wilayah serta kondisi geografis yang sulit membuat belum optimalnya pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Bengkalis.

c. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

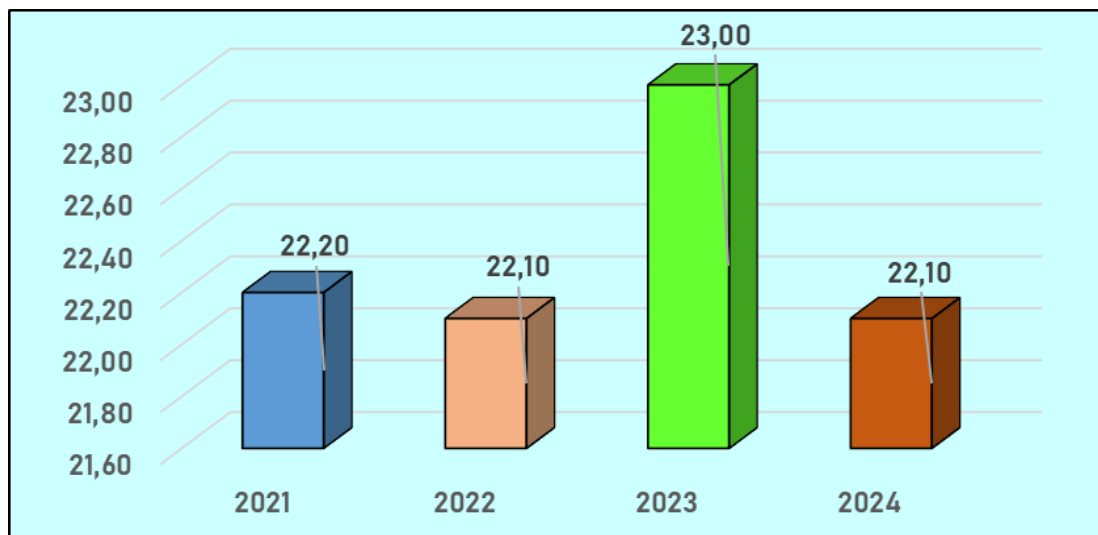
1. Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) Kabupaten Bengkulu pada tahun 2024 sebesar 65,25. Walaupun capaian I Bangga di Kabupaten Bengkulu ini sudah melebihi target yang ditentukan sebesar 63,46 tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau. I Bangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan keluarga yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. I Bangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. I Bangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Perbandingan I Bangga di Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.5.

**Gambar 2.5**  
**Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024**



2. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 22,10 tahun masih lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 22,74 tahun. MUKP adalah angka median usia saat pertama kali seorang wanita menikah, dalam rentang usia 15-49 tahun, yang berstatus menikah atau pernah menikah. Ini mengacu pada usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok usia tersebut sudah menikah. MUKP adalah indikator penting untuk memahami perubahan pola fertilitas dan sebagai tolok ukur pembangunan keluarga. Peningkatan MUKP sering dikaitkan dengan peningkatan kesehatan dan kualitas hidup perempuan. MUKP di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 22,10 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 23,00 tahun. Tren MUKP di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar 2.6.

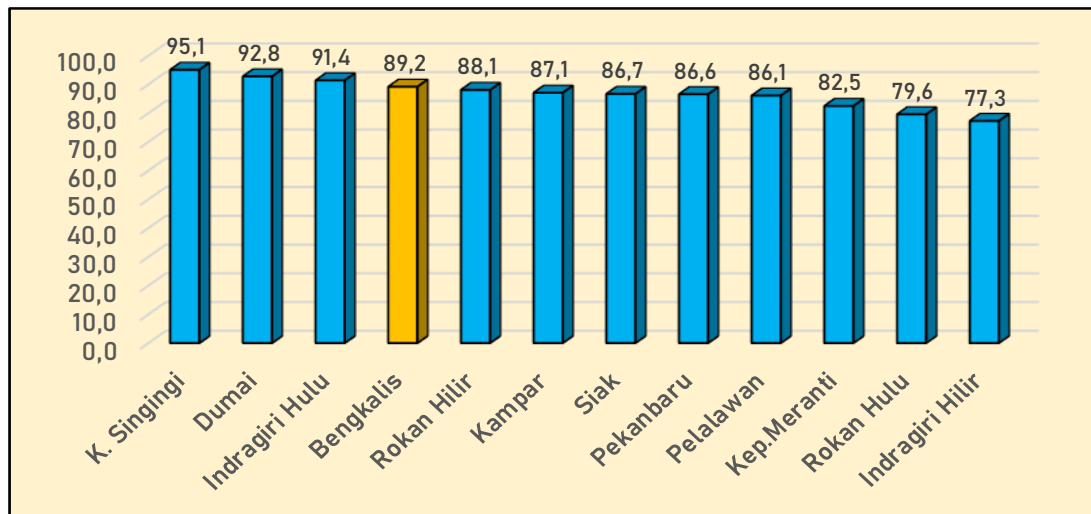
**Gambar 2.6**  
**Tren MUKP di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024**



3. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat di Kabupaten Bengkalis tentang program Bangga Kencana, sehingga perlu adanya KIE yang lebih kreatif dan inovatif yang berbasis pada kearifan lokal juga

melalui media sosial sehingga menjangkau ke semua kalangan, termasuk generasi milenial dan generasi Z. Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2024 persentase masyarakat di Kabupaten yang terpapar Program Bangga Kencana sebesar 89,2%. Persentase masyarakat yang terpapar Program Bangga Kencana di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 2.7.

**Gambar 2.7**  
**Persentase Masyarakat Terpapar Program Bangga Kencana**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024**



4. Pelaksanaan advokasi dan pemberian Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat belum optimal.
5. Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai Keluarga Berencana yang belum responsif gender. Hal ini tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB dan masih rendahnya partisipasi/kesertaan KB pria sebesar 18,1% pada tahun 2024.
6. Mekanisme operasional lini lapangan belum berjalan dengan efektif, sehingga dampak dari penyuluhan program Bangga Kencana perlu terus ditingkatkan.



7. Peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam program KB belum optimal, sehingga diperlukan penguatan dukungan melalui pengikatan kemitraan.

d. Permasalahan terkait Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Belum optimalnya pengetahuan orangtua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak akibat tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat terutama generasi milenial dan generasi Z.
2. Cakupan kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKA masih rendah, hal ini disebabkan terbatasnya jumlah kelompok kegiatan dan belum optimalnya pengelolaan poktan yang ada, sehingga belum seluruh sasaran Poktan terjangkau oleh ruang lingkup Poktan.
3. Kelompok Kegiatan (Poktan) yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA).
4. Peran UPPKA untuk meningkatkan pendapatan keluarga akseptor belum optimal.
5. Peran PIK-R dan Duta Genre dalam sosialisasi Program Bangga Kencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja belum optimal.
6. Tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi.
7. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku berisiko masih rendah.
8. Belum optimalnya peran PPKS dalam upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.



9. Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah.
10. Kualitas hidup Lanjut Usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal.
11. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB.

## **2.6. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bengkalis serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 adalah: **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia."**

Penjelasan dari visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. **Bermarwah**, bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
2. **Maju**, bermakna: Suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;



3. **Sejahtera**, bermakna: Suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil dan merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.
4. **Unggul**, bermakna: Suatu kondisi tercapainya semua indikator pembangunan daerah, baik dari aspek fisik maupun non fisik, berprestasi dan berinovasi serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu sebagai berikut:

**1) Misi Pertama: Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.**

Misi pertama ini berfokus pada:

a. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif.

- Efisiensi dan Transparansi Anggaran: Mengelola anggaran daerah dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas agar alokasi dana tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah.
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan sumber lain yang sah guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
- Optimalisasi Belanja Daerah: Mengalokasikan belanja daerah secara strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program peningkatan ekonomi masyarakat.



b. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) secara Berkelanjutan.

- Eksplorasi dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan: Mengelola sumber daya alam (seperti minyak, gas, pertanian, perikanan, dan kehutanan) dengan prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
- Pengembangan Hilirisasi Industri: Meningkatkan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam melalui pengolahan industri agar daerah tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah.
- Penguatan Regulasi dan Pengawasan Lingkungan: Mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan dengan menerapkan regulasi yang ketat dan mendorong praktik ramah lingkungan.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas.

- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan: Mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan industri serta memperkuat program pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal.
- Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan: Memberikan dukungan kepada UMKM dan *startup* lokal dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, dan kemudahan regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
- Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Tenaga Kerja: Meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program kesehatan, jaminan sosial, dan penguatan daya tawar tenaga kerja dalam pasar ekonomi yang kompetitif.
- Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenang, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.



d. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing.

- Pengembangan Infrastruktur Ekonomi: Membangun kawasan industri, serta fasilitas perdagangan untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi.
- Peningkatan Investasi Daerah: Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif kepada investor, kemudahan perizinan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha.
- Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi: Mengembangkan ekonomi berbasis digital dengan mendorong adopsi teknologi dalam sektor industri, perdagangan, dan layanan publik guna meningkatkan efisiensi dan daya saing global.

Secara umum misi pertama ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sehat, pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor utama dalam membangun ekonomi daerah yang lebih kompetitif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, sehingga daerah dapat berkembang secara mandiri dan berdaya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.

**2) Misi Kedua, Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.**

Misi kedua ini memiliki dua pilar utama, yaitu reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai agama serta budaya Melayu, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan membangun masyarakat yang memiliki karakter kuat. Dalam konteks pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, berikut adalah fokus utama dari misi kedua ini:



a. Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Reformasi birokrasi menjadi landasan penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pemerintahan daerah.

Beberapa fokus utamanya adalah:

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  - Mengembangkan layanan berbasis digital untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
  - Menerapkan sistem pelayanan terpadu (*one-stop service*) untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
  - Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan.
  - Mengoptimalkan sistem *e-Government* untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan layanan administrasi.
  - Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pemerintahan melalui mekanisme partisipatif dan keterbukaan informasi publik.
  - Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- 3) Reformasi Struktur dan Budaya Kerja Birokrasi.
  - Mendorong birokrasi yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan global dan perubahan teknologi.
  - Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih (*overlap*) kebijakan dan program pembangunan.



- Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*performance-based*) dengan evaluasi berkala terhadap kinerja birokrat.

b. Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu.

Nilai-nilai agama dan budaya Melayu menjadi faktor penting dalam membentuk karakter masyarakat dan memperkuat identitas daerah.

Fokus dalam lima tahun ke depan meliputi:

1) Peningkatan Peran Agama dalam Kehidupan Sosial.

- Mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan pembangunan sosial dan pendidikan.
- Mendukung program-program dakwah dan pendidikan agama yang moderat dan inklusif.
- Mendorong peran tokoh agama dalam memperkuat harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis agama.

2) Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu.

- Mempromosikan budaya Melayu dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif.
- Mendorong penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi resmi dan edukasi sebagai bagian dari identitas daerah.
- Mengembangkan festival budaya dan seni Melayu sebagai strategi meningkatkan kebanggaan daerah serta daya tarik wisata.

3) Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal.

- Memasukkan nilai-nilai budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan sebagai bagian dari pendidikan karakter.
- Menanamkan nilai gotong royong, hormat terhadap adat, dan etika Melayu dalam kehidupan masyarakat.
- Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan berbasis budaya lokal untuk mencetak generasi yang berkarakter.



c. Menuju Masyarakat yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

Tujuan akhir dari misi ini adalah menciptakan masyarakat yang memiliki karakter kuat dan siap menghadapi tantangan zaman.

Fokus utamanya adalah:

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
  - Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik melalui musyawarah dan forum dialog.
  - Mengembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
  - Memperkuat nilai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama melalui program sosial berbasis budaya dan agama.
- 2) Penguatan Identitas Lokal dalam Era Globalisasi.
  - Menyelaraskan budaya lokal dengan perkembangan teknologi dan modernisasi agar tetap relevan dalam era digital.
  - Mengembangkan kebijakan ekonomi kreatif berbasis budaya Melayu untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional.
  - Memanfaatkan media sosial dan digital sebagai sarana edukasi budaya serta promosi identitas lokal.

Misi kedua ini menitikberatkan pada pembentukan pemerintahan yang transparan, efisien, dan inovatif melalui reformasi birokrasi, serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu sebagai identitas daerah. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan misi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, serta masyarakat yang berkarakter kuat dan berdaya saing di tengah arus globalisasi.



### **3) Misi Ketiga, Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.**

Misi ketiga ini berfokus pada dua aspek utama, yakni: penyediaan infrastruktur berkualitas dan pengembangan potensi wilayah perbatasan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, beberapa fokus utama yang perlu diperhatikan dalam lima tahun ke depan adalah:

#### **a. Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas.**

Infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mempercepat pembangunan daerah.

##### **1) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Transportasi.**

- Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan.
- Pengembangan transportasi umum dan logistik untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
- Optimalisasi sarana dan prasarana pelabuhan, dan terminal guna mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata.

##### **2) Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

- Penyediaan akses listrik dan energi ke daerah-daerah yang belum teraliri listrik secara optimal.
- Pengembangan infrastruktur air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



- Pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar.

b. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembangunan Infrastruktur.

- Penerapan digital dalam pembangunan daerah, seperti digitalisasi layanan publik dan pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi.
- Pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan akses informasi di daerah perbatasan.

c. Pengembangan Potensi Wilayah Perbatasan.

Wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan perdagangan, maupun pintu gerbang ke pasar internasional.

1) Penguatan Ekonomi di Wilayah Perbatasan.

- Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
- Pendirian kawasan industri atau perdagangan di perbatasan guna menarik investasi dan mendorong ekspor produk lokal.
- Pemberdayaan UMKM di wilayah perbatasan dengan pelatihan, akses permodalan, dan fasilitas pemasaran.

2) Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Perbatasan.

- Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang modern untuk memperlancar arus perdagangan dan mobilitas masyarakat.
- Penguatan koordinasi dengan aparat keamanan untuk mengatasi ancaman seperti penyelundupan dan perdagangan ilegal.
- Peningkatan infrastruktur pertahanan guna menjaga kedaulatan dan stabilitas sosial ekonomi di daerah perbatasan.



3) Pengembangan Sumber Daya Manusia di Wilayah Perbatasan.

- Penyediaan pendidikan berkualitas di daerah perbatasan agar masyarakat setempat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
- Pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal untuk menciptakan peluang kerja baru.
- Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam meningkatkan inovasi berbasis potensi lokal.

d. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Perbatasan.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi perbatasan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Meningkatkan Akses dan Kesejahteraan Masyarakat.

- Infrastruktur yang baik memungkinkan masyarakat memperoleh akses lebih mudah ke pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar ekonomi.
- Pengembangan perbatasan sebagai pusat ekonomi baru dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2) Meningkatkan Daya Saing Daerah.

- Wilayah perbatasan yang berkembang dapat menjadi pusat perdagangan dan investasi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing daerah.
- Konektivitas yang lebih baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investor untuk berinvestasi di daerah.

Misi ketiga ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas guna meningkatkan konektivitas, layanan dasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, pengembangan potensi wilayah perbatasan diarahkan untuk

menciptakan pusat ekonomi baru, memperkuat ketahanan wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan implementasi yang tepat, pembangunan infrastruktur dan wilayah perbatasan dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan daerah yang maju dan berdaya saing.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis termasuk pada Misi ke-2 yaitu **Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter** dengan tujuan untuk Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Baik, Bersih dan Akuntabel.

## 2.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isu-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan Bidang Keluarga Berencana, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan serta Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bonus demografi pada tahun 2045 menjadikan pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu dari tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 adalah “Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas”, dengan fokusnya “Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman,

tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga). I Bangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan keluarga yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. I Bangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. I Bangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia salah satu hal juga yang menjadi isu krusial adalah pengendalian *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Kelahiran Total. TFR di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 2,5 merupakan TFR yang tertinggi dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Riau.

Dalam hal pengendalian angka kelahiran, perlu meningkatkan akses pelayanan Keluarga Berencana dan juga meningkatkan kesertaan ber-KB. Sehingga setiap individu ataupun Pasangan Usia Subur (PUS) seharusnya memiliki akses terhadap informasi KB dan kesehatan reproduksi, dan layanan KB untuk perencanaan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal. Maka diperlukan adanya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta pemetaan pengendalian penduduk di daerah. Guna mendukung peningkatan kesertaan masyarakat dalam program Bangga Kencana, informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik menjadi salah satu cara yang tepat di era digitalisasi saat ini untuk menyasar Pasangan Usia Subur (PUS) Milenial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap kesehatan reproduksi. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan



berkeluarga dan diharapkan akan meningkatkan Median Usia Kawin Pertama (MUKP).

Terkait dengan isu kualitas sumber daya manusia, hal yang paling menjadi ancaman adalah adanya anak *stunting*. *Stunting* (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Bengkalis sebesar 12,5 pada tahun 2024 berada di bawah angka nasional. Namun demikian menjadi sebuah ancaman yang harus selalu diwaspadai. Karena akan melahirkan generasi yang minim prestasi dan juga daya saing rendah. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Bengkalis harus terus memberikan perhatian serius terhadap isu *stunting* ini agar anak-anak di Kabupaten Bengkalis dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Salah satu yang perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1000 HPK) serta peningkatan pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran penting dalam pencegahan penambahan angka *stunting* baru. Pendekatan yang dilakukan oleh DPPKB adalah melalui upaya preventif yaitu dengan



intervensi gizi sensitif. Hal yang diupayakan adalah melakukan pendampingan terhadap keluarga-keluarga berisiko *stunting*.

Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis diharapkan memberikan kontribusi yang nyata, dengan peningkatan kesertaan ber-KB dan kesehatan reproduksi dan juga adanya pendampingan untuk remaja siap nikah atau calon pengantin, ibu hamil dan juga ibu melahirkan. Disamping itu, Program Bangga Kencana secara keseluruhan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia secara umum dan juga kualitas kesehatan.

Berdasarkan identifikasi masalah dan telaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait baik secara fungsional maupun struktural, terdapat beberapa isu strategis yang berkenaan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang memiliki kewenangan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 65,25. Walaupun capaian I Bangga di Kabupaten Bengkalis ini sudah melebihi target yang ditentukan sebesar 63,46 tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau.
2. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Bengkalis sebesar 12,5 pada tahun 2024 berada di bawah angka nasional dan merupakan prevalensi terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Namun demikian *stunting* tetap menjadi sebuah ancaman yang harus selalu diwaspadai, karena akan melahirkan generasi yang minim prestasi dan juga daya saing rendah.
3. Angka *Total Fertility Rate* (TFR) yang tinggi. Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 2,5 merupakan TFR yang tertinggi se-Provinsi Riau.

Pengendalian Angka Kelahiran Total (TFR) menjadi salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan. Hal ini berdampak pada angka laju pertumbuhan penduduk alami.

4. *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (MCPR) atau penggunaan rata-rata kontrasepsi modern di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024 berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2024 sebanyak 78,3% masih didominasi oleh penggunaan alat kontrasepsi metode jangka pendek (pil, suntik, kondom). Akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek ini sebesar 61,6% dan metode kontrasepsi jangka pendek ini sangat rawan untuk *drop out* atau pemakaian kontrasepsi putus pakai yang bisa mengakibatkan kehamilan.
5. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024 sebesar 22,10 tahun masih lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 22,74 tahun. MUKP adalah angka median usia saat pertama kali seorang wanita menikah, dalam rentang usia 15-49 tahun, yang berstatus menikah atau pernah menikah. Ini mengacu pada usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok usia tersebut sudah menikah. MUKP adalah indikator penting untuk memahami perubahan pola fertilitas dan sebagai tolok ukur pembangunan keluarga. Peningkatan MUKP sering dikaitkan dengan peningkatan kesehatan dan kualitas hidup perempuan. MUKP di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2024 sebesar 22,10 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 23,00 tahun.
6. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah tentang program Bangga Kencana, sehingga perlu adanya KIE yang lebih kreatif dan inovatif yang berbasis pada kearifan lokal juga melalui media sosial sehingga menjangkau ke semua kalangan, termasuk generasi milenial dan generasi Z. Berdasarkan hasil



- Pendataan Keluarga Tahun 2024 persentase masyarakat di Kabupaten yang terpapar Program Bangga Kencana sebesar 89,2%.
7. Optimalisasi pelaksanaan advokasi dan pemberian Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat.
  8. Optimalisasi peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
  9. Optimalisasi pengetahuan orangtua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak akibat tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat terutama generasi milenial dan generasi Z.
  10. Peningkatan cakupan keluarga yang bergabung dalam Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL dan UPPKA.
  11. Optimalisasi peran Kelompok Kegiatan (Poktan) yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
  12. Optimalisasi peran PIK-R dan Duta Genre dalam sosialisasi Program Bangga Kencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja.
  13. Tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih cukup tinggi.
  14. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku berisiko masih rendah.
  15. Belum optimalnya peran PPKS dalam upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  16. Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah.
  17. Kualitas hidup Lanjut Usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal.



18. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB.
19. Optimalisasi kualitas Kelompok Kerja/Pokja Kampung KB dan peran lintas sektor di semua kampung KB yang ada di Kabupaten Bengkalis.
20. Kualitas data pelaporan yang belum optimal dan harus ditingkatkan.
21. Jumlah penduduk usia remaja yang tinggi dengan tingkat kesadaran terhadap kesehatan reproduksi yang masih rendah.
22. Pola asuh dan tumbuh kembang anak usia dibawah lima tahun (Balita) belum optimal.
23. Optimalisasi peran PIK-R dan GenRe untuk mensosialisasikan Program Bangga Kencana terutama kepada generasi milenial dan generasi Z.
24. Pemberdayaan dan pembinaan kesehatan penduduk Lanjut Usia (Lansia) untuk menciptakan Lansia Tangguh.

Berikut uraian isu strategis yang terkait dengan program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana:

### **1. Isu Strategis terkait Pengendalian Penduduk**

#### **a. Bonus demografi.**

Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga). I Bangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan keluarga yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah



di Indonesia. I Bangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. I Bangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 65,25. Walaupun capaian I Bangga di Kabupaten Bengkalis ini sudah melebihi target yang ditentukan sebesar 63,46 tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau. Untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia salah satu hal juga yang menjadi isu krusial adalah pengendalian *Total Fertility Rate (TFR)*/ Angka Kelahiran Total. TFR di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 2,5 merupakan TFR yang tertinggi dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Riau. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan diantaranya melalui peningkatan produktifitas angkatan kerja serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/*Total Fertility Rate (TFR)*. Hal ini untuk mempertahankan laju pertumbuhan penduduk alami agar senantiasa terkendali. TFR di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebesar 2,5 dan tahun 2023 sebesar 2,45 yang artinya setiap Perempuan Usia Subur di Kabupaten Bengkalis rata-rata melahirkan 2 sampai 3 orang anak.

b. *Stunting*

Prevalensi *stunting* dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa *stunting* merupakan salah satu masalah gizi terbesar pada balita di Indonesia. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di



bawah standar. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua dari standar deviasi (-2 SD) panjang atau tinggi anak seumurnya. *Stunting* dapat menghambat pertumbuhan fisik, meningkatkan kerentanan anak terhadap penyakit, menimbulkan hambatan perkembangan kognitif yang bisa menurunkan kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. *Stunting* juga akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit degeneratif pada usia dewasa. Selain itu, *stunting* juga dapat menurunkan produktivitas anak di masa depan seperti mudah sakit, kemampuan kognitif yang menurun, mudah terserang penyakit pada saat sudah tua, fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang, dan postur tubuh yang tidak maksimal pada saat dewasa. Prevalensi *stunting* Kabupaten Bengkalis berdasarkan data SSGI pada tahun 2023 sebesar 17,9% dan tahun 2024 sebesar 12,5%. Walaupun prevalensi *stunting* di Kabupaten Bengkalis sudah mengalami penurunan yang signifikan tetapi Kabupaten Bengkalis harus mampu menjaga momentum penurunan ini dan sekaligus mewaspadaai terhadap kemungkinan terjadinya fluktuasi prevalensi *stunting*.

c. *Aging population.*

Perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (*aging population*) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat.



- d. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Gagasan perencanaan berkeluarga dimulai dari tahap pra keluarga (perencanaan hidup berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), Pendidikan anak usia dini (pra Sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan);

- e. Satu data kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di satu sisi Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan Kemendukbangga/BKKBN dan juga DPPKB Kabupaten Bengkulu harus dapat diintegrasikan dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk serta data Kependudukan dan Pencatatan sipil, sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap baik, guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Bengkulu untuk mendukung operasional program/kegiatan Bangga Kencana di lini lapangan.



## 2. Isu Strategis terkait pelayanan Keluarga Berencana

- a. Persentase pemakaian kontrasepsi modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (MCPR) di Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh pemakaian kontrasepsi jangka pendek yang sangat berisiko terjadinya *droup out*, terutama di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda. Hal ini disebabkan dari rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi khususnya alat kontrasepsi modern metode jangka panjang. Sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan dan mempertahankan pemakaian kontrasepsi modern terutama untuk kontrasepsi metode jangka panjang. Strategi tersebut diantaranya adalah peningkatan akses layanan kontrasepsi termasuk jaminan kesediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana dan pelayanan KB bergerak, serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu untuk menyoar pasangan usia muda/pasangan milenial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;
- b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan melalui Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) adalah salah satu strategi untuk mensosialisasikan implementasi delapan fungsi keluarga dalam membentuk keluarga berkualitas. Di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 telah terbentuk 155 Kampung KB yang berarti sudah seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai



Kampung KB. Dalam implementasinya Kampung KB harus terintegrasi dengan lintas sektor juga kelompok-kelompok kegiatan terutama BKB, BKR, BKL dan UPPKA. Selain itu peran serta lintas sektor seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pertanian juga merupakan strategi bukti dukungan lintas sektor untuk peningkatan keluarga berkualitas. Dengan sudah dibentuknya Kampung KB di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis ini selanjutnya diharapkan agar dibentuk Kelompok Kegiatan dan selanjutnya bisa menyusun program serta kegiatan yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat disertai dengan munculnya inovasi-inovasi sesuai dengan masalah dan potensi lokal di masing-masing desa/kelurahan.

- c. Pemberdayaan secara optimal petugas lini lapangan, seperti Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD serta kader KB yang akan sangat membantu implementasi program Bangga Kencana di masyarakat.

### **3. Isu Strategis terkait Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- a. Rendahnya ketahanan keluarga akan berdampak pada kesejahteraan keluarga. Pemahaman keluarga terhadap delapan fungsi keluarga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa sangat dominan. Keluarga memiliki peran penting dalam upaya pembentukan dan pengembangan karakter manusia yang positif. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya, merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota



masyarakat yang berkarakter. Cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya terkait nilai toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan, kerukunan, kepedulian terhadap sesama serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral dan karakter bermartabat melalui peran Kampung KB dan juga kelompok-kelompok kegiatan (BKB, BKR, dan BKL), serta peran UPPKA sebagai pendorong pendapatan keluarga untuk peningkatan ketahanan ekonomi keluarga yang berdampak pada kesejahteraan keluarga. Peran BKB, BKR dan BKL perlu dimaksimalkan sebagai upaya pembinaan terhadap kehidupan keluarga berkelanjutan, dari keluarga yang memiliki balita, remaja hingga lansia.

- b. Pada tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis masih terdapat pernikahan yang usia perempuannya di bawah 19 tahun. *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 tahun pada tahun 2024 sebanyak 14,9 anak dari 1000 perempuan. ASFR 15-19 tahun adalah indikator demografi yang mengukur tingkat kelahiran pada kelompok antara usia 15 hingga 19 tahun. Pernikahan di bawah usia 19 tahun memiliki risiko tinggi. Dampak dari pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual serta risiko komplikasi yang terjadi di saat



kehamilan dan saat persalinan pada usia yang sangat muda. Penyebaran informasi dan edukasi yang tepat, masif dan komprehensif tentang penyiapan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi remaja melalui pemanfaatan kelompok kegiatan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan tingkah laku remaja dalam menghindari permasalahan terkait penyakit menular, kehamilan di usia muda hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas dan mortalitas ibu. Perkawinan di usia anak-anak pun mampu menyumbang terhadap kelahiran bayi *stunting*. Hal ini bisa terjadi, akibat dari ketidakpahaman tentang kesehatan reproduksi dan juga belum siapnya remaja pada penyiapan kehidupan berkeluarga.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam mencapai visi dan misi, melaksanakan visi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada hasil akhir (*final outcome*). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perangkat daerah tidak memiliki visi dan misi sendiri, tetapi secara bersama-sama mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Perumusan tujuan perangkat daerah diselaraskan dengan tujuan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara SMART, yakni:

- *Specific* (khusus);
- *Measurable* (dapat diukur);
- *Action oriented* (memiliki orientasi pada tindakan);
- *Realistic* (realistis); dan
- *Timely* (jelas penentuan waktunya).

Adapun tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.1.



**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Renstra DPPKB**  
**Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Baik, Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	75,0	76,5	77,5	78,5	79,5
				2. Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
				3. Meningkatnya pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
			3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program Keluarga Berencana	1. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut cara/alat KB modern ( <i>demand satisfied of modern contraception</i> )	96,8	97,1	97,3	97,5	97,8
				2. Angka kelahiran menurut usia tertentu/ <i>Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun</i>	13,5	12,4	11,5	10,8	10,1
				3. Persentase KB Pasca Persalinana (KBPP)	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0



				4. Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraception Prevalence Rate/MCPR</i> )	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5
				4. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	55,2	58,2	61,2	64,2	67,2
			5. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	67,0	67,7	68,8	69,9	70,9
				2. Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	34,5	39,0	45,0	52,5	57,0
				3. Indeks Lansia Berdaya	62,2	62,7	63,2	63,6	64,1
				4. Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	85,9	87,0	87,9	88,8	89,7
			6. Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )	2,12	2,12	2,11	2,11	2,10

Dari tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki tujuan yaitu: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Baik, Bersih dan Akuntabel.

### **3.2. Sasaran**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis memiliki 6 (Enam) sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana
5. Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS); serta
6. Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk;

### **3.3. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan Arah Kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2.



**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan Keluarga Berkualitas	Sasaran 1: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Strategi 1.1: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja. b. Pengendalian Program KKBPK. c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana. d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok). e. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
		Strategi 1.2: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB. b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). c. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Strategi 1.3: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya. b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan MKJP. c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB. d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya. e. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. f. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak. g. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB.
		Strategi 1.4: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	a. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB. b. Pembinaan Terpadu Kampung KB. c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Sasaran 2: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Strategi 2.1: Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. b. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA). c. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA). d. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA). e. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA). f. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Sasaran 3: Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Strategi 3.1: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota. b. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal. c. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
		Sasaran 3.2: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga. b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga. c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Strategi 1.1: Meningkatkan kualitas perencanaan, mengacu pada perencanaan berbasis kinerja.	a. Penyelarasan dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan lain b. Penerapan SOP dan SPIP c. Evaluasi capaian kinerja secara periodik
		Strategi 1.2: Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	a. Penerapan sistem pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. b. Pembinaan dan pengembangan pegawai. c. Evaluasi kinerja pegawai.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Sasaran 2: Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Strategi 2.1: Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	a. Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI). b. Monitoring dan Evaluasi
	Sasaran 3: Meningkatnya pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Strategi 3.1: Penyusunan Peta Risiko Perangkat Daerah	a. Identifikasi dan Mitigasi Peta Risiko Perangkat Daerah. b. Penyusunan Peta Risiko Perangkat Daerah. c. Monitoring dan Evaluasi

1. Tujuan 1 : Mewujudkan Keluarga Berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB).

Strategi 1.1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.

Kebijakan : 1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.  
2. Pengendalian Program KKBPK.  
3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana.  
4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok).  
5. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.

Strategi 1.2 : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).

- Kebijakan :
1. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
  2. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
  3. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).

Strategi 1.3 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

- Kebijakan :
1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
    1. Peningkatan Kesertaan Penggunaan MKJP.
    2. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
    3. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya,
    4. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
    5. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
    6. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB.



Strategi 1.4 : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Kebijakan : 1. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.  
2. Pembinaan Terpadu Kampung KB.  
3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)

Strategi 2.1 : Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Kebijakan : 1. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.  
2. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA).  
3. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA).  
4. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA).  
5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA).  
6. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

Sasaran 3 : Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk.

Strategi 3.1 : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kebijakan : 1. Penyusunan dan Pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.

3. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

2. Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah.

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Strategi 1.1 : Meningkatkan kualitas perencanaan, mengacu pada perencanaan berbasis kinerja.

Kebijakan : 1. Penyelarasan dokumen perencanaan PD dengan dokumen perencanaan lain.

2. Penerapan SOP dan SPIP.

3. Evaluasi capaian kinerja secara periodik.

Strategi 1.2 : Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.

Kebijakan : 1. Penerapan sistem pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Pembinaan dan pengembangan pegawai.

3. Evaluasi kinerja pegawai.

Sasaran 2 : Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah.

Strategi 2.1 : Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah

Kebijakan : 1. Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI).  
2. Monitoring dan Evaluasi

Sasaran 3 : Meningkatnya pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

Strategi 3.1 : Penyusunan Peta Risiko Perangkat Daerah

Kebijakan : 1. Identifikasi dan Mitigasi Peta Risiko Perangkat Daerah.  
2. Penyusunan Peta Risiko Perangkat Daerah.  
3. Monitoring dan Evaluasi.

### **3.4. Cascading**

Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Cascading Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah**

ISU STRATEGIS KABUPATEN BENGKALIS	KEPALA DAERAH			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			PROGRAM			NAMA PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME
Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)												
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	- Demand Satisfied of Modern Contraception - Modern Contraception Prevalence Rate/MCPR	Meningkatkan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya Pelayanan KB-KR	- Demand Satisfied of Modern Contraception - Modern Contraception Prevalence Rate/MCPR - Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Terlaksananya Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk sesuai kearifan Lokal	Tersampainya informasi Pengendalian penduduk sesuai dengan kearifan lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
														Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian Program KKBPK			
														Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			
														Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (minilok)			
														Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang			



ISU STRATEGIS KABUPATEN BENGKALIS	KEPALA DAERAH			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			PROGRAM			NAMA PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME
											Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB		
															Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
															Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
											Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
															Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
															Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB		
															Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		



ISU STRATEGIS KABUPATEN BENGKALIS	KEPALA DAERAH			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			PROGRAM			NAMA PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME
														Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			
														Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah laporan dukungan operasional Pelayanan KB Bergerak			
														Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengelola dan petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola & Petugas Logistik Alat & Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			
					Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri					Pemberdayaan dan Peningkatan Persan Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Persan Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		
														Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			
														Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			



ISU STRATEGIS KABUPATEN BENGKALIS	KEPALA DAERAH			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			PROGRAM			NAMA PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	
					Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	- Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga. - Indeks Lansia Berdaya - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga			- Persentase keluarga yang mengikuti kelompok ketahanan keluarga. - Indeks Lansia Berdaya - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga		
															Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/ UPPKA)	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)			
															Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA yang tersedia	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA yang tersedia			
															Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)			
															Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan			



ISU STRATEGIS KABUPATEN BENGKALIS	KEPALA DAERAH			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			PROGRAM			NAMA PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN				SUB KEGIATAN				
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	
											Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
				Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		- Total Fertility Rate (TFR) - Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19	Meningkatkan implementasi kebijakan pengendalian penduduk	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	- Total Fertility Rate (TFR) - Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah yang dikelola			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
														Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal & Non Formal				
														Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana				
										Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk yang dikelola			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia				



ISU STRATEGIS KABUPATEN BENGKALIS	KEPALA DAERAH			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			PROGRAM			NAMA PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN				SUB KEGIATAN			
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME
															Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga		
															Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan pengolahan dan pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang direncanakan untuk periode tahun 2025-2029 menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 meliputi:

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub kegiatan terdiri dari:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub kegiatan terdiri dari:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Sub kegiatan terdiri dari:
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Sub kegiatan terdiri dari:
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub kegiatan terdiri dari:
  - a. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub kegiatan terdiri dari:
  - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;



8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub kegiatan terdiri dari:
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **B. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengendalian Penduduk yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. Sub kegiatan terdiri dari:
  - a. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan KKBPK;
  - b. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal;
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan terdiri dari:
  - a. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
  - b. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain;



- c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
- d. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
- e. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
- f. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB;

### **C. Program Keluarga Berencana**

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal. Sub Kegiatan terdiri dari:
  - a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;
  - b. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
  - c. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
  - d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok);
  - e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK;
  - f. Pengendalian Program KKBPK.
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). Sub Kegiatan terdiri dari:
  - a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB;



- b. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Penggerakan Kader Instritusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
  - d. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan terdiri dari:
- a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
  - b. Peningkatan Kesertaan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
  - c. Penyediaan Dukungan Pengayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP;
  - d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
  - e. Peningkatan Kesertaan KB Pria;
  - f. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Sub Kegiatan terdiri dari:
- a. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  - b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;



- c. Pelaksanaan dan Pengelolaan KKBPK di Kampung KB;
- d. Pembinaan Terpadu Kampung KB.

#### **D. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Sub Kegiatan terdiri dari:
  - a. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga);
  - b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
  - c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
  - d. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
  - e. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga);
  - f. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA);



- g. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA).
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Sub Kegiatan terdiri dari:
  - a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
  - b. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS);
  - c. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja;
  - d. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/ Balita).

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta Pendanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu tahun 2025 - 2029 secara lengkap dan rinci dapat dilihat pada tabel 4.1. dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2029**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	Indikator Kinerja Program dan Pendanaan Indikatif											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD Tahun 2029	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	65,25	67,0	13.455.502.627	67,7	17.232.222.239	68,8	18.955.444.463	69,9	20.850.988.909	70,9	22.936.087.800	70,9	22.936.087.800
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	<i>Demand Satisfied of Modern Contraception</i>	96,5	96,8	2.144.787.515	97,1	3.298287.417	97,3	3.628.116.158	97,5	3.990.927.774	97,8	4.390.020.551	97,8	4.390.020.551
	<i>Modern Contraception Prevalence Rate/MCPR</i>	78,3	78,5		79,5		80,5		81,5		82,5		82,5	
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	52,2	55,2		58,2		61,2		64,2		67,2		67,2	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga	26,50	34,50	904.146.769	39,00	2.209.676.996	45,00	2.430.644.695	52,50	2.673.709.165	57,00	2.941.080.082	57,00	2.941.080.082
	Indeks Lansia Berdaya	61,7	62,2		62,7		63,2		63,6		64,1		64,1	
	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	84,8	85,9		87,0		87,9		88,8		89,7		89,7	
Program Pengendalian Penduduk	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,50	2,12	49.997.964	2,12	243.488.960	2,11	267.837.856	2,11	294.621.642	2,10	324.083.806	2,10	324.083.806
	<i>Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19</i>	14,9	13,5		12,4		11,5		10,8		10,1		10,1	



**Tabel 4.2**

**Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan DPPKB Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029**

No	Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran										PD Penanggung Jawab	Ket
				2025		2026		2027		2028		2029			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.455.502.627		17.232.222.239		18.955.444.463		20.850.988.909		22.936.087.800		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				13.455.502.627		17.232.222.239		18.955.444.463		20.850.988.909		22.936.087.800		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				13.455.502.627		17.232.222.239		18.955.444.463		20.850.988.909		22.936.087.800		
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja	72,5	75,0	10.346.570.379	76,5	11.480.768.866	77,5	12.628.845.752	78,5	13.891.730.328	79,5	15.280.903.360		
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				176.599.974		207.646.871		228.411.559		251.252.714		276.377.986		
	a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	126.600.000	4 Dokumen	139.260.000	4 Dokumen	153.186.000	4 Dokumen	168.504.600	4 Dokumen	185.355.060		
	b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2.560.500	2 Dokumen	2.816.550	2 Dokumen	3.098.205	2 Dokumen	3.408.026		
	c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2.350.750	2 Dokumen	2.585.825	2 Dokumen	2.844.408	2 Dokumen	3.128.848		
	d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	1.950.650	2 Dokumen	2.145.715	2 Dokumen	2.360.287	2 Dokumen	2.596.315		
	e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2.100.000	2 Dokumen	2.310.000	2 Dokumen	2.541.000	2 Dokumen	2.759.100		



No	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran										PD Penanggung Jawab	Ket
				2025		2026		2027		2028		2029			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen	4.425.000	4 Dokumen	4.867.500	4 Dokumen	5.354.250	4 Dokumen	5.889.675		
	g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.974	1 Dokumen	54.999.971	1 Dokumen	60.499.969	1 Dokumen	66.549.965	1 Dokumen	73.204.962		
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	7.000.000.000	100%	7.702.750.000	100%	8.473.025.000	100%	9.320.327.500	100%	10.252.360.250		
	a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	40 Orang	7.000.000.000	42 Orang	7.700.000.000	44 Orang	8.470.000.000	46 Orang	9.317.000.000	48 Orang	10.248.700.000		
	b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	2.750.000	1 Dokumen	3.025.000	1 Dokumen	3.327.500	1 Dokumen	3.660.250		
	3) Administrasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	787.200.000	100%	865.920.000	100%	952.512.000	100%	1.047.763.200	100%	1.152.539.520		
	a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	787.200.000	1 Dokumen	865.920.000	1 Dokumen	952.512.000	1 Dokumen	1.047.763.200	1 Dokumen	1.152.539.520		
	4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000		
	a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	35 Orang	50.000.000	37 Orang	55.000.000	38 Orang	60.500.000	40 Orang	66.550.000	43 Orang	73.205.000		
	5) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.099.799.366	100%	1.208.283.065	100%	1.329.111.371	100%	1.462.022.508	100%	1.608.224.759		
	a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	30 paket	30 paket	74.996.580	35 paket	81.000.000	40 paket	89.100.000	45 paket	98.010.000	50 paket	107.811.000		
	b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	90.570.111	22 Paket	99.627.122	25 Paket	109.589.834	27 Paket	120.548.818	30 Paket	132.603.700		
	c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.850 Paket	2.850 Paket	185.000.000	2.850 Paket	203.500.000	2.850 Paket	223.850.000	2.850 Paket	246.235.000	2.850 Paket	270.858.500		



No	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran										PD Penanggung Jawab	Ket
				2025		2026		2027		2028		2029			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	69.999.401	33 Paket	76.999.341	36 Paket	84.699.275	40 Paket	93.169.203	43 Paket	102.486.123		
	e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 dokumen	30 dokumen	20.000.000	30 dokumen	22.000.000	30 dokumen	24.200.000	30 dokumen	26.620.000	30 dokumen	29.282.000		
	f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412 Laporan	412 Laporan	435.633.274	430 Laporan	479.196.601	450 Laporan	527.116.262	475 Laporan	579.827.888	500 Laporan	637.810.676		
	g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	223.600.000	1 dokumen	245.960.000	1 dokumen	270.556.000	1 dokumen	297.611.600	1 dokumen	327.372.760		
	6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	49.983.893	100%	87.482.282	100%	96.230.511	100%	105.853.562	100%	116.438.918		
	a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	2 Unit	32.500.000	2 Unit	35.750.000	2 Unit	39.325.000	2 Unit	43.257.500		
	b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	49.983.893	2 Unit	54.982.282	2 Unit	60.480.511	2 Unit	66.528.562	2 Unit	73.181.418		
	7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	480.824.225	100%	528.906.648	100%	581.797.312	100%	639.977.043	100%	703.974.748		
	a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	189.676.625	1 laporan	208.644.288	1 laporan	229.508.716	1 laporan	252.459.588	1 laporan	277.705.547		
	b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	171.080.000	1 laporan	188.188.000	1 laporan	207.006.800	1 laporan	227.707.480	1 laporan	250.478.228		
	c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	120.067.600	1 laporan	132.074.360	1 laporan	145.281.796	1 laporan	159.809.976	1 laporan	175.790.973		
	8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	749.800.000	100%	824.780.000	100%	907.258.000	100%	997.983.800	100%	1.097.782.180		
	a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	277.840.000	9 Unit	305.624.000	9 Unit	336.186.400	9 Unit	369.805.040	9 Unit	406.785.544		



No	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran										PD Penanggung Jawab	Ket
				2025		2026		2027		2028		2029			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	230.400.000	1 Unit	253.440.000	1 Unit	278.784.000	1 Unit	306.662.400	1 Unit	337.328.640		
	c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	91.560.000	14 Unit	100.716.000	16 Unit	110.787.600	18 Unit	121.866.360	20 Unit	134.052.996		
	d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	150.000.000	12 Unit	165.000.000	12 Unit	181.500.000	12 Unit	199.650.000	12 Unit	219.615.000		
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate /TFR</i> )	2,50	2,12		2,12		2,11		2,11		2,10			
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Ratel ASFR 15-19</i> )	14,9	13,5	49.997.964	12,4	243.488.960	11,5	267.837.856	10,8	294.621.642	10,1	324.083.806		
	1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100%	100%	29.999.893	100%	65.950.382	100%	72.545.421	100%	79.799.963	100%	87.779.959		
	a) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 dokumen	1 dokumen	29.999.893	1 dokumen	32.999.882	1 dokumen	36.299.871	1 dokumen	39.929.858	1 dokumen	43.922.843		
	b) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	-	1 dokumen	4.200.500	1 dokumen	4.620.550	1 dokumen	5.082.605	1 dokumen	5.590.866		
	c) Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	1 laporan	-	-	1 laporan	28.750.000	1 laporan	31.625.000	1 laporan	34.787.500	1 laporan	38.266.250		
	2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	19.998.071	100%	177.538.578	100%	195.292.436	100%	214.821.680	100%	236.303.847		
	a) Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-	-	-	1 dokumen	3.650.000	1 dokumen	4.015.000	1 dokumen	4.416.500	1 dokumen	4.858.150		



No	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran										PD Penanggung Jawab	Ket
				2025		2026		2027		2028		2029			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	b) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk		-	-	3 unit	15.075.000	5 unit	16.582.500	6 unit	18.240.750	8 unit	20.064.825		
	c) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		-	-	1 laporan	60.140.500	1 laporan	66.154.550	1 laporan	72.770.005	1 laporan	80.047.006		
	d) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	1 laporan	1 laporan	19.998.071	1 laporan	21.997.878	1 laporan	24.197.666	1 laporan	26.617.433	1 laporan	29.279.176		
	e) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		-	-	1 laporan	48.225.000	1 laporan	53.047.500	1 laporan	58.352.250	1 laporan	64.187.475		
	f) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		-	-	12 laporan	28.450.200	12 laporan	31.295.220	12 laporan	34.424.742	12 laporan	37.867.216		
3.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut cara/alat KB modern ( <i>demand satisfied of modern contraception</i> ) Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraception Prevalence Rate/MCPR</i> ) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	96,5	96,8	2.144.787.515	97,1	3.298287.417	97,3	3.628.116.158	97,5	3.990.927.774	97,8	4.390.020.551		
			78,3	78,5		79,5		80,5		81,5		82,5			
			52,2	55,2		58,2		61,2		64,2		67,2			
	1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					503.357.250		553.692.975		609.062.273		669.968.500		
	a) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		-	-	3 organisasi	54.630.500	3 organisasi	60.093.550	3 organisasi	66.102.905	3 organisasi	72.713.196		
	b) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		-	-	2 dokumen	12.875.500	2 dokumen	14.163.050	2 dokumen	15.579.355	2 dokumen	17.137.291		



No	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran										PD Penanggung Jawab	Ket
				2025		2026		2027		2028		2029			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	c) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		-	-	3 dokumen	145.300.750	3 dokumen	159.830.825	3 dokumen	175.813.908	3 dokumen	193.395.298		
	d) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		-	-	12 laporan	66.000.000	12 laporan	72.600.000	12 laporan	79.860.000	12 laporan	87.846.000		
	e) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		-	-	4 laporan	182.750.500	4 laporan	201.025.550	4 laporan	221.128.105	4 laporan	243.240.916		
	f) Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		-	-	4 laporan	41.800.000	4 laporan	45.980.000	4 laporan	50.578.000	4 laporan	55.635.800		
	<b>2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Perlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.178.799.345</b>	<b>100%</b>	<b>1.502.630.030</b>	<b>100%</b>	<b>1.652.893.032</b>	<b>100%</b>	<b>1.818.182.336</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000.569</b>		
	a) Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		-	-	2 organisasi	25.950.500	2 organisasi	28.545.550	2 organisasi	31.400.105	2 organisasi	34.540.116		
	b) Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		-	-	12 laporan	94.300.000	12 laporan	103.730.000	12 laporan	114.103.000	12 laporan	125.513.300		



No	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran										PD Penanggung Jawab	Ket
				2025		2026		2027		2028		2029			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	c) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		-	-	250 kader	85.700.250	300 kader	94.270.275	350 kader	103.697.303	400 kader	114.067.033		
	d) Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		12 laporan	1.178.799.345	12 laporan	1.296.679.280	12 laporan	1.426.347.207	12 laporan	1.568.981.928	12 laporan	1.725.880.121		
	3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	489.989.030	100%	562.538.483	100%	618.792.331	100%	680.671.564	100%	748.738.721		
	a) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	12 laporan	109.992.975	12 laporan	120.992.273	12 laporan	133.091.500	12 laporan	146.400.650	12 laporan	161.040.715		
	b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.300 orang	3.300 orang	130.000.556	3.400 orang	143.000.612	3.500 orang	157.300.673	3.600 orang	173.030.740	3.700 orang	190.333.814		
	c) Penyediaan Dukungan Pengayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Pengayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		-	-	10 laporan	15.800.250	10 laporan	17.380.275	10 laporan	19.118.303	10 laporan	21.030.133		
	d) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1 laporan	49.996.173	1 laporan	54.995.790	1 laporan	60.495.369	1 laporan	66.544.906	1 laporan	73.199.397		
	e) Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria		-	-	11 Akseptor	7.750.300	11 Akseptor	8.525.330	11 Akseptor	9.377.863	11 Akseptor	10.315.649		
	f) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah laporan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 laporan	12 laporan	199.999.326	12 laporan	219.999.259	12 laporan	241.999.184	12 laporan	266.199.103	12 laporan	292.819.013		



No	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran										PD Penanggung Jawab	Ket
				2025		2026		2027		2028		2029			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		100%	475.999.140	100%	729.761.454	100%	802.737.599	100%	883.011.359	100%	971.312.495		
a)	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		-	-	3 organisasi	15.650.750	3 organisasi	17.215.825	3 organisasi	18.937.408	3 organisasi	20.831.148		
b)	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		-	-	12 dokumen	12.100.900	12 dokumen	13.310.990	12 dokumen	14.642.089	12 dokumen	16.106.298		
c)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		-	-	33 KKB	178.410.750	40 KKB	196.251.825	45 KKB	215.877.008	50 KKB	237.464.708		
d)	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 laporan	1 laporan	475.999.140	1 laporan	523.599.054	1 laporan	575.958.959	1 laporan	633.554.855	1 laporan	696.910.341		
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	26,50	34,5	904.146.769	39,0	2.209.676.996	45,0	2.430.644.695	52,5	2.673.709.165	57,0	2.941.080.082		
	Indeks Lansia Berdaya	61,7	62,2	62,7		63,2		63,6		64,1					
	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	84,8	85,9	87,0		87,9		88,8		89,7					
1)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			404.147.265		1.602.146.492		1.762.361.141		1.938.597.255		2.132.456.980		
a)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk		-	-	3 kelompok	11.300.500	5 kelompok	12.430.550	6 kelompok	13.673.605	8 kelompok	15.040.966		



No	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran										PD Penanggung Jawab	Ket
				2025		2026		2027		2028		2029			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	b) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		-	-	25 unit	120.983.000	25 unit	133.081.300	25 unit	146.389.430	25 unit	161.028.373		
	c) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				420 kader	969.500.500	430 kader	1.066.450.550	435 kader	1.173.095.605	440 kader	1.290.405.166		
	d) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				66 kelompok	55.800.500	66 kelompok	61.380.550	66 kelompok	67.518.605	66 kelompok	74.270.466		
	e) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 laporan	1 laporan	54.152.000	1 laporan	59.567.200	1 laporan	65.523.920	1 laporan	72.076.312	1 laporan	79.283.943		
	f) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	2 laporan	2 laporan	49.996.000	2 laporan	54.995.600	2 laporan	60.495.160	2 laporan	66.544.676	2 laporan	73.199.144		
	g) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	100 kader	100 kader	299.999.265	120 kader	329.999.192	140 kader	362.999.111	160 kader	399.299.022	180 kader	439.228.924		



No	Uraian	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Anggaran										PD Penanggung Jawab	Ket
				2025		2026		2027		2028		2029			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	100%	499.999.504	100%	607.530.504	100%	668.283.555	100%	735.111.910	100%	808.623.101		
a)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	2 laporan	8.500.000	2 laporan	9.350.000	2 laporan	10.285.000	2 laporan	11.313.500			
b)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	3 organisasi	15.130.250	3 organisasi	16.643.275	3 organisasi	18.307.603	3 organisasi	20.138.363			
c)	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	-	-	2 laporan	33.900.800	2 laporan	37.290.880	2 laporan	41.019.968	2 laporan	45.121.965			
d)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/ Balita)	Jumlah laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/ Balita)	2 laporan	2 laporan	499.999.504	2 laporan	549.999.454	2 laporan	604.999.400	2 laporan	665.499.340	2 laporan	732.049.274		

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai target indikator kinerja yang dibebankan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan kewenangannya melaksanakan 1 Program Urusan Penunjang Pemerintahan yang didukung oleh 8 Kegiatan serta 3 Program Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang didukung oleh 8 Kegiatan. Berikut adalah Program dan Kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah.
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  
- II. Program Pengendalian Penduduk
  1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Penduduk.
  2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

### III. Program Pembinaan Keluarga Berencana

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan kesertaan ber-KB.

### IV. Program Pemberdayaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

#### **4.2. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis yang mendukung pada isu strategis, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3. dan 4.4. sebagai berikut:



**Tabel 4.3.**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKB Kabupaten Bengkulu**  
**yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	65,2	67,0	67,7	68,8	69,9	70,9	70,9
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	73,5	75,0	76,5	77,5	78,5	79,5	79,5
3.	Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

**Tabel 4.4.**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPPKB Kabupaten Bengkulu**  
**yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut cara/alat KB modern ( <i>demand satisfied of modern contraception</i> )	96,5	96,8	97,1	97,3	97,5	97,8	97,8
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraception Prevalence Rate/MCPR</i> )	78,3	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	82,5
3	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	52,2	55,2	58,2	61,2	64,2	67,2	67,2
4	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	26,5	34,5	39,0	45,0	52,5	57,0	57,0
5	Indeks Lansia Berdaya	61,7	62,2	62,7	63,2	63,6	64,1	64,1
6	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	84,8	85,9	87,0	87,9	88,8	89,7	89,7
7	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )	2,5	2,12	2,12	2,11	2,11	2,11	2,10
8	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Spesific Fertility Rate/ ASFR 15-19</i> )	14,9	13,5	12,4	11,5	10,8	10,1	10,1
9	Persentase Prevalensi <i>Stunting</i>	12,5	9,67	9,40	9,12	8,84	8,56	8,56
10	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	67,20	68,76	70,32	71,88	73,44	75,00	75,00
11	Kelompok sasaran yang mendapatkan pendampingan oleh TPK	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 - 2029 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu, serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi seluruh unit kerja dan stakeholder urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain :

- 1) Memprioritaskan pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu;
- 2) Mengupayakan potensi yang dimiliki baik Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu;
- 3) Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga hasilnya lebih efektif.

Selanjutnya Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu adalah:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik- baiknya;
2. Diharapkan kepada seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang- Bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkesinambungan dan berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan program ini mengacu pada sejumlah program yang secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029, Renstra BKKBN serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum. Dokumen Renstra ini secara normatif telah diupayakan untuk mendukung program-program yang

terkait dengan isu strategis di Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025 - 2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan disusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah, diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten Bengkulu Tengah.

Tindak lanjut disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan sumber daya manusia;
2. Melakukan upaya koordinasi dengan stakeholder terkait;
3. Melakukan upaya yang signifikan guna meningkatkan pencapaian indikator utama dan indikator kunci yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2025 - 2029 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dalam penyusunan selanjutnya.

